

Diplomasi Nabi Muhammad SAW dalam Membangun Kejayaan Umat

Muqoddam Cholil¹, Ahmad Faris¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Indonesia

Received: 23/04/2026	Revised: 31/05/2026	Accepted: 30/06/2026
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This article discusses the diplomacy of the Prophet Muhammad PBUH as a model of political communication, conflict resolution, and the development of civilization of the people. This study is important because prophetic diplomacy is often understood only as a historical event, even though it contains principles of negotiation, conflict control, respect for treaties, and peace preaching strategies that are relevant to contemporary society. The purpose of this research is to explain the pattern of diplomacy of the Prophet Muhammad PBUH in the pre-prophetic phase, the da'wah phase of Makkah, and the state phase of Medina. The research uses a qualitative method based on literature studies with a historical-normative approach. The main data are taken from the Qur'an, hadiths, the book of sirah, and modern academic literature on diplomacy, the charter of Medina, and the Treaty of Hudaibiyah. The results of the study show that the Prophet's diplomacy is built on the principles of trust, patience to listen, deliberation, respect for the interlocutor, commitment to agreements, and long-term benefit orientation. The event of the laying of Hajar Aswad, the dialogue with Quraish figures, the Charter of Medina, and the Hudaibiyah Agreement show his capacity as a spiritual leader as well as a statesman. This article concludes that prophetic diplomacy is a model of public communication ethics and conflict resolution that is able to transform tribal communities into civilized people.

Keywords

prophetic diplomacy; Prophet Muhammad; conflict resolution; Treaty of Hudaibiyah; Medina Charter

Corresponding Author:

Muqoddam Cholil
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Indonesia; abufatih66@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW bukan hanya pembawa risalah keagamaan, tetapi juga pemimpin sosial yang berhasil mengelola masyarakat majemuk, menghadapi konflik antarkabilah, dan membangun tatanan politik baru di Madinah. Keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan diplomasi yang tampak sejak sebelum kenabian hingga masa pembentukan negara Madinah. Dalam konteks sejarah Arab abad ketujuh, diplomasi menjadi instrumen penting karena masyarakat hidup dalam struktur tribal yang sangat sensitif terhadap kehormatan, perjanjian, dan loyalitas kabilah.

Diplomasi dalam artikel ini dipahami sebagai kecakapan berkomunikasi, merundingkan kepentingan, meredakan konflik, dan membangun kesepakatan secara damai. Dalam perspektif Islam,



diplomasi tidak berdiri di atas kepentingan pragmatis semata, tetapi terikat pada nilai tauhid, amanah, keadilan, pemenuhan janji, dan rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, diplomasi Nabi Muhammad SAW menggabungkan keteguhan prinsip dengan keluwesan strategi.

Kajian ini penting karena sejumlah peristiwa sirah memperlihatkan bahwa Nabi SAW menghadapi lawan politik, tokoh agama, komunitas Yahudi, kaum munafik, dan berbagai kabilah Arab dengan pendekatan yang berbeda-beda, tetapi tetap berada dalam bingkai akhlak dan keadilan. Peristiwa peletakan Hajar Aswad menunjukkan kapasitas mediasi sebelum kenabian; dialog dengan Utbah bin Rabi'ah menunjukkan kesabaran komunikasi; Piagam Madinah menunjukkan kemampuan membangun konsensus; sedangkan Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan kecermatan membaca masalahat jangka panjang.

Tujuan artikel ini adalah mengedit dan mengembangkan naskah tentang diplomasi Nabi Muhammad SAW agar sesuai dengan format artikel ilmiah *Social Science Academic*. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga pertanyaan: bagaimana konsep diplomasi dalam perspektif sirah Nabi, bagaimana bentuk-bentuk diplomasi Nabi pada berbagai fase dakwah, dan apa relevansi diplomasi kenabian bagi pembangunan umat dan resolusi konflik kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah historis-normatif, yaitu membaca fakta sejarah dalam sumber-sumber sirah, hadis, dan karya historiografi Islam, kemudian menafsirkan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, Sirah Ibn Hisham, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Fath al-Bari, al-Bidayah wa al-Nihayah, dan Zad al-Ma'ad. Sumber sekunder mencakup karya-karya modern tentang diplomasi Islam, Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, kepemimpinan Nabi, dan resolusi konflik.

Teknik analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi peristiwa-peristiwa diplomatik utama dalam sirah Nabi. Kedua, klasifikasi nilai diplomasi yang muncul, seperti amanah, musyawarah, kesabaran, komitmen pada perjanjian, penghormatan terhadap pihak lain, dan orientasi masalahat. Ketiga, interpretasi relevansi nilai-nilai tersebut bagi konteks dakwah, kepemimpinan, dan hubungan sosial pada masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan utama kajian ini menunjukkan bahwa diplomasi Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang utuh: spiritual, etis, komunikatif, dan strategis. Diplomasi beliau tidak sekadar menghindari perang, tetapi membangun ruang komunikasi agar manusia dapat menerima kebenaran secara sadar. Pola ini berbeda dari diplomasi yang hanya berorientasi pada kemenangan politik jangka

pendek. Nabi SAW tetap menjaga prinsip akidah, tetapi memilih cara penyampaian yang santun, bertahap, dan memperhatikan kondisi psikologis lawan bicara.

3.1. Diplomasi Pra-Kenabian: Mediasi Hajar Aswad

Salah satu contoh awal diplomasi Nabi SAW adalah penyelesaian konflik peletakan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi. Para pemimpin Quraisy hampir berperang karena setiap kabilah ingin memperoleh kehormatan meletakkan batu tersebut. Nabi Muhammad SAW menawarkan solusi simbolik yang membuat semua kabilah terlibat: Hajar Aswad diletakkan di atas kain, setiap pemimpin kabilah mengangkat sisi kain, lalu beliau sendiri meletakkannya pada tempatnya. Solusi ini menunjukkan prinsip partisipasi, penghargaan martabat, dan pencegahan konflik.

Peristiwa ini juga menjelaskan mengapa masyarakat Makkah memberikan gelar al-Amin kepada Nabi. Gelar tersebut bukan sekadar pengakuan moral, tetapi modal sosial yang membuat beliau dipercaya dalam forum yang berpotensi melahirkan kekerasan. Dalam teori resolusi konflik modern, tindakan ini dapat dibaca sebagai mediasi kreatif yang menjaga muka semua pihak dan mengubah konflik kehormatan menjadi kerja bersama.

3.2. Diplomasi Dakwah Makkah: Kesabaran Dialog dan Keteguhan Prinsip

Pada fase Makkah, Nabi SAW menghadapi tekanan keras dari tokoh-tokoh Quraisy. Dialog dengan Utbah bin Rabi'ah menunjukkan kemampuan beliau mendengar secara penuh sebelum menjawab. Ketika Utbah menawarkan harta, kedudukan, dan perempuan sebagai imbalan agar dakwah dihentikan, Nabi SAW tidak memotong pembicaraan, tidak membalas dengan celaan, dan tidak terjebak pada provokasi. Beliau hanya bertanya apakah Utbah telah selesai berbicara, lalu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an.

Model komunikasi ini memperlihatkan bahwa diplomasi kenabian tidak berarti kompromi terhadap kebenaran. Nabi SAW tetap menyampaikan tauhid, tetapi cara penyampaiannya jauh dari arogansi. Kesabaran mendengar menjadi bagian dari dakwah. Dalam konteks komunikasi publik, sikap ini relevan untuk menghindari eskalasi konflik, terutama ketika lawan bicara datang dengan prasangka dan tekanan emosional.

Dialog Nabi SAW dengan para pembesar Quraisy di sisi Abu Thalib juga memperlihatkan daya tarik argumentasi strategis. Beliau menyampaikan bahwa kalimat tauhid akan mengangkat kedudukan bangsa Arab dan membuat bangsa lain menghormati mereka. Pernyataan ini bukan janji politik kosong, melainkan visi peradaban yang kemudian terbukti pada masa Khulafaur Rasyidin ketika Islam berkembang melampaui Jazirah Arab.

3.3. Diplomasi Kenegaraan: Piagam Madinah

Ketika hijrah ke Madinah, Nabi SAW tidak hanya membangun komunitas ibadah, tetapi juga menata masyarakat plural yang terdiri dari Muhajirin, Anshar, komunitas Yahudi, dan kelompok-kelompok kabilah. Piagam Madinah menjadi dokumen penting karena mengatur hak dan kewajiban bersama, mekanisme pertahanan, penghormatan agama, serta komitmen hidup berdampingan. Dokumen ini memperlihatkan bahwa diplomasi Nabi bergerak dari level personal menuju level konstitusional.

Piagam Madinah memuat prinsip bahwa masyarakat yang berbeda latar belakang dapat terikat dalam kesepakatan politik untuk menjaga keamanan bersama. Dalam kerangka ini, Nabi SAW tampil sebagai pemimpin yang menempatkan keadilan dan perjanjian di atas fanatisme kesukuan. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam sejak awal memiliki perhatian pada keteraturan sosial, perlindungan komunitas, dan pencegahan konflik internal.

3.4. Perjanjian Hudaibiyah: Strategi Damai dan Maslahat Jangka Panjang

Perjanjian Hudaibiyah merupakan puncak diplomasi Nabi SAW dalam menghadapi Quraisy. Secara lahiriah, beberapa klausul perjanjian tampak merugikan kaum Muslimin. Nabi SAW menerima penghapusan basmalah dalam bentuk lengkap dan penghapusan gelar Rasulullah dari naskah perjanjian karena pihak Quraisy menolaknya. Para sahabat merasa berat menerima keputusan itu, tetapi Nabi SAW melihat maslahat yang lebih besar: gencatan senjata, pengakuan eksistensi komunitas Muslim, dan terbukanya ruang dakwah damai.

Dampak Hudaibiyah sangat besar. Setelah perjanjian, mobilitas dakwah meningkat, komunikasi antar kabilah lebih terbuka, dan Islam berkembang lebih cepat. Dalam waktu relatif singkat, perjanjian ini menjadi pintu menuju Fath Makkah. Peristiwa ini mengajarkan bahwa diplomasi yang baik tidak selalu tampak menang pada tahap awal, tetapi mampu menghasilkan kemenangan strategis yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dari sisi teori konflik, Hudaibiyah mengandung unsur de-eskalasi, pengendalian simbol, kesediaan memberi konsesi teknis, dan orientasi pada hasil jangka panjang. Nabi SAW tidak mengorbankan substansi iman, tetapi bersedia mengalah pada aspek redaksional dan prosedural demi menghindari pertumpahan darah. Inilah keseimbangan antara prinsip dan strategi.

3.5. Surat-Surat Diplomatik dan Hubungan Internasional

Setelah Hudaibiyah, Nabi SAW mengirim surat kepada para penguasa sekitar, termasuk penguasa Romawi, Persia, Mesir, dan wilayah Arab lainnya. Surat-surat tersebut menunjukkan bentuk diplomasi internasional yang beradab: menggunakan utusan, memakai bahasa resmi, menyampaikan pesan

secara ringkas, dan menghormati posisi penerima surat tanpa menghilangkan inti dakwah. Pengiriman surat menandai bahwa Islam tidak bersifat lokal, melainkan membawa pesan universal.

Dalam konteks hubungan internasional modern, praktik ini menunjukkan beberapa prinsip penting: perlindungan utusan, etika korespondensi, ajakan damai sebelum konflik, dan pengakuan terhadap otoritas politik lain sebagai pihak yang diajak berdialog. Diplomasi Nabi SAW dengan demikian dapat dibaca sebagai fondasi etika hubungan antarbangsa dalam tradisi Islam.

3.6. Pengakuan Sarjana Barat dan Relevansi Kontemporer

Sejumlah penulis Barat mengakui keunikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan negara. Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah karena keberhasilannya pada dimensi agama sekaligus duniawi. Montgomery Watt juga menggambarkan beliau sebagai nabi dan negarawan. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi tidak hanya dihormati dalam tradisi Muslim, tetapi juga dikaji dalam historiografi modern.

Relevansi diplomasi Nabi bagi masa kini terletak pada kemampuannya memberi jalan tengah antara idealisme moral dan realitas sosial. Di tengah konflik identitas, polarisasi politik, dan budaya komunikasi yang sering kasar, diplomasi kenabian menawarkan model komunikasi yang tegas namun lembut, terbuka namun berprinsip, dan damai namun tidak kehilangan visi keadilan.

4. KESIMPULAN

Diplomasi Nabi Muhammad SAW merupakan bagian integral dari keberhasilan dakwah dan pembangunan umat. Sejak sebelum kenabian, beliau telah memperlihatkan kapasitas mediasi melalui peristiwa Hajar Aswad. Pada fase Makkah, beliau menunjukkan kesabaran dialog, keteguhan prinsip, dan kemampuan menghadapi tekanan tanpa kehilangan akhlak. Pada fase Madinah, diplomasi beliau berkembang menjadi tata kelola sosial dan kenegaraan melalui Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, dan surat-surat diplomatik kepada para penguasa.

Kajian ini menyimpulkan bahwa diplomasi kenabian dibangun atas prinsip amanah, kesabaran, musyawarah, penghormatan terhadap perjanjian, pengendalian konflik, dan orientasi maslahat jangka panjang. Model ini relevan untuk dakwah, pendidikan, kepemimpinan, hubungan antaragama, serta resolusi konflik kontemporer. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian ini dengan membandingkan diplomasi Nabi dengan teori negosiasi modern atau mengkaji penerapannya dalam komunikasi organisasi Islam masa kini.

REFERENSI

- Al-Asqalani, I. H. (1379 H). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. Al-Maktabah al-Salafiyah.
- Al-Baladhuri. (1959). *Futuh al-Buldan*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Bukhari, M. I. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazali, M. (2001). *Fiqh al-Sirah*. Dar al-Qalam.
- Al-Mubarakfuri, S. R. (2016). *Al-Rahiq al-Makhtum*. Dar al-Hilal.
- Al-Tabari, M. J. (1989). *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Mu'assasat al-A'la li al-Matbu'ah.
- Aziz, A. (2023). Prophetic leadership and peacebuilding in the Medina community. *Journal of Islamic Studies and Civilization*, 11(2), 145-162.
- Buthi, M. S. R. (2001). *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*. Dar al-Salam.
- Eriyandes, D. (2025). Lessons from the prophetic model for contemporary Sharia economic diplomacy. *Lentera Peradaban*, 2(1), 1-16.
- Hamidi, H. F. (2024). The impact of the Treaty of Hudaibiyyah on the spread of Islamic teachings. *International Journal of Social Science and Civilization*, 4(2), 55-70.
- Hart, M. H. (1992). *The 100: A ranking of the most influential persons in history*. Citadel Press.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1994). *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-Ibad*. Mu'assasat al-Risalah.
- Ibn Hisham, A. M. (n.d.). *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Kathir, A. F. (1997). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Dar Hajar.
- Lamartine, A. de. (1854). *Histoire de la Turquie (Vol. 2)*. Paris.
- Muhammad, M. (2022). Diplomacy ethics in the prophetic tradition: A study of treaties and envoys. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 5(4), 201-218.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2000). *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*. Dar al-Ma'rifah.
- Nasution, H. (2021). Piagam Madinah dan prinsip kewargaan dalam masyarakat plural. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 55(1), 77-96.
- Pratama, D. A. (2023). Rethinking the role of sole mediator in building non-violent religious practices: Medina Charter perspective. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1-24.
- Rahman, F. (2022). Conflict resolution in the life of Prophet Muhammad: Lessons from the Meccan and Medinan periods. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 89-104.
- Samosir, H. E. (2025). Recontextualizing the Medina Charter: Consensus-based political communication for contemporary plural societies. *Metro Islamic Law Review*, 4(1), 645-675.
- Smith, P. S. (2006). The Hudaibiya model of Islamic diplomacy. *Florida Journal of International Law*, 18(2), 1-32.
- Usman, S. M. (2025). An examination of Muhammad's diplomatic foresight in conflict resolution. *Journal of Religion and Society*, 7(2), 90-108.

- Wahyuni, S. (2024). The role of the Prophet in peacebuilding in Medina. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 3(2), 112-128.
- Watt, W. M. (1974). *Muhammad: Prophet and statesman*. Oxford University Press.
- Yusuf, M. (2021). Hudaybiyyah as a model of Islamic negotiation and peace strategy. *Islamic Communication Journal*, 6(2), 133-150.
- Zainuddin, M. (2022). Prophetic communication and social cohesion in early Islam. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 16(1), 41-58.

